



Yunianto Dwi Sutono, Kepala Kantor Pengelola Taman Pintar

# Integritas Tak Hanya di Kertas

Masyarakat Jogjakarta, hampir semua tahu Taman Pintar. Belum lama ini, tepatnya pada peringatan Hari Antikorupsi, 9 Desember 2014, wahana edukasi yang dinakhodai Yunianto Dwi Sutono itu mendapat predikat sebagai wilayah yang bebas dari korupsi. Kemarin, Radar Jogja mendapat kesempatan ngobrol dengan Yunianto Dwi Sutono sang Kepala Kantor Pengelola Taman Pintar itu.

**KANTOR** Pengelola Taman Pintar menjadi satu dari dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Jogja yang mampu menjadi wilayah bebas korupsi (WBK) di Hari Antikorupsi 9 Desember 2014 lalu. Selain Dinas Perizinan (Dinzin) yang dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Raihan Kantor Taman Pengelola Taman Pintar ini tentu sebuah prestasi. Sebab, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menjadi satu-satunya di Indonesia dari 12 instansi seluruh Indonesia yang mendapat penghargaan itu.

Khusus untuk antikorupsi, Taman Pintar memang langsung turut serta. Tak hanya dengan prestasi WBK, Taman Pintar juga menjadi kandang dari bus antikorupsi. Bus

yang bernama Anticorruption Learning Center (ACLC) ini, setiap hari berada di wahana edukasi tersebut.

"Kami memang menawarkan diri untuk ikut berperan mendidik generasi muda yang memiliki integritas," kata Kepala Kantor Pengelola Taman Pintar Yunianto Dwi Sutono kemarin (31/1).

Ia mengungkapkan, semua elemen harus ikut turun tangan memerangi korupsi. Nah, sebagai wahana edukasi, Taman Pintar ikut berperan langsung dalam hal pencegahan. "Melalui kampanye. Di ACLC ini, semua anak pengunjung Taman Pintar bisa mengetahui apa itu korupsi?" tambahnya.

Mantan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda, dan Olahraga Kota Jogja ini menambahkan, penghargaan WBK merupakan langkah

awal menjadikan BLUD tersebut, benar-benar profesional. Juga memiliki integritas dalam melayani seluruh anak bangsa menikmati pendidikan yang menyenangkan.

"Sebagai BLUD, tujuan awal memang untuk melayani masyarakat. Pertama kali, filosofi ini harus benar-benar dipegang," tuturnya.

Selanjutnya, dalam membangun sistem, menurut Yunianto, harus konsisten. Seperti soal pengadaan barang dan jasa di Taman Pintar. Pihaknya selalu berkonsultasi dengan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sudah ada fasilitas dari DPDPK dan BPKP. Itu dimaksimalkan. Setiap akan melaksanakan apa pun (berhubungan dengan keuangan), kami selalu konsultasikan," ujarnya.

Inilah yang kemudian membuat Taman Pintar juga sukses masuk Zona Integritas. Salah satu program dari KemenPAN dan Reformasi Birokrasi untuk pencehanan antikorupsi. "Maret atau April, akan ada launching dari KemenPAN dan KPK di sini (Taman Pintar)," imbuhnya.

Dia menambahkan, di Taman Pintar, pihaknya memiliki modal kuat untuk membangun BLUD itu benar-benar sehat. Baik dari sisi keuangan, maupun layanan. Serta, mampu menjadi wahana edukasi dalam pencegahan korupsi.

"Semua karyawan di Taman Pintar, memiliki semangat sama, untuk memberikan edukasi melalui wahana yang ada menciptakan generasi-generasi yang berintegritas. Terutama dalam hidup sehari-hari, bukan hanya di secarik kertas," katanya. (pra/eri/jko/ty)

# Mandiri Tanpa Beban APBD

TAMAN Pintar tak hanya mampu berkembang menjadi salah satu tujuan pariwisata di DIJ. Wahana edukasi ini juga berhasil menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang benar-benar mandiri, tanpa menyusu (subsidi) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja.

Padahal, jika melihat tarif masuk ke Taman Pintar sangat murah. Tarifnya, Rp 8 ribu untuk anak-anak, dan Rp 18 ribu untuk dewasa. Dengan nominal tersebut, sangat murah dibandingkan tujuan wisata lain yang memiliki hal yang sama. "Filosofi BLUD adalah memberikan layanan," tegas Kepala Kantor Pengelola Taman Pintar Yunianto Dwi Sutono.

Yuni, panggilan akrabnya, menjelaskan, Taman Pintar bisa mandiri, dan secara keuangan sehat, tak lepas dari kejelian semua pihak di kantor itu. Mereka selalu menghitung

secara detail biaya yang dibutuhkan. Itu untuk menyesuaikan tarif masuk tak membebani APBD, namun juga tak memberatkan bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke taman pintar.

"Itulah yang selalu kami lakukan. Kami tidak rugi, namun juga tetap terjangkau untuk semua lapisan masyarakat," imbuh mantan Kepala Bagian Humas Sekretariat Kota (Setkot) Jogja ini.

Ia menambahkan, sebagai BLUD, Taman Pintar sebenarnya bisa mengajukan anggaran ke APBD. Hanya saja, hal tersebut, tak mereka perlukan. Kecuali jika ada pengembangan di area tersebut. "Itu pun masuk sebagai aset dari pemkot," tambahnya.

Pria yang berasal dari Kulonprogo ini mengatakan, sebagai BLUD, sebenarnya memang fleksibel secara anggaran. Hanya saja, semua itu tetap harus dipertanggungjawabkan. "Ma-

kanya, di sini benar-benar menganut transparansi dalam anggaran," jelasnya.

Yang membedakan Taman Pintar dengan BLUD lain, kata Yuni, mengenai rencana bisnis. Dalam penyusunan perencanaan ini, pihaknya selalu memperhatikan aspek pendanaan. Biasanya, memprioritaskan bekerja sama dengan pihak lain. "Itu pun ada peraturannya. Seperti apa bentuk kerja sama itu. Karena juga tidak bisa asal kerja sama," lanjutnya.

Dalam melaksanakan kerja sama, Taman Pintar banyak menjalin dengan swasta, dan instansi pemerintah. Tapi, semua itu mereka lakukan dalam bentuk barang. Pengelola Taman Pintar hanya melakukan perawatan.

"Jika dilakukan *upgrade* terhadap wahana (kerja sama) itu, mereka (pihak ketiga) yang juga melaksanakan," terangnya. (eri/jko/ty)



TAK HANYA DI KERTAS: Bersama semua karyawan, Yunianto Dwi Sutono (kiri) memiliki semangat sama, memberikan edukasi melalui wahana yang ada menciptakan generasi-generasi yang berintegritas.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Peng. Taman Pintar	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005